



Pentingnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Anggi Rizkina Sari Siregar¹, Namira Hamni Lubis², Fadhilla Isfa³, Muzayyana⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: anggirizkina@gmail.com¹, namirahhmni@gmail.com², fadhilaisfa1006@gmail.com³, muzayyanagayo@gmail.com⁴

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235.

Abstract. *Equitable economic development in Indonesia is an important strategic issue to improve people's welfare. The purpose of this study is to examine how equitable development can reduce regional economic disparities and improve people's access to essential services including infrastructure, healthcare, and education. The research methodology was a qualitative approach with a literature review, which involved collecting and evaluating information from various academic sources and government records. The findings of this study show that equitable development enhances local economic growth and job creation in addition to improving living standards for populations in less developed areas. In addition, equitable development contributes to social and political stability, reduces conflict due to inequality, and strengthens national unity. This research provides recommendations for more effective and sustainable development equity policies, involving the active role of local governments and communities to achieve equitable and inclusive economic growth across Indonesia.*

Keywords: *Community Welfare, Economic Growth, Government Programs*

Abstrak. Pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan isu strategis yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari studi ini adalah untuk meneliti bagaimana pembangunan yang adil dapat mengurangi kesenjangan ekonomi regional dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan penting termasuk infrastruktur, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Metodologi penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tinjauan pustaka, yang melibatkan pengumpulan dan evaluasi informasi dari berbagai sumber akademis dan catatan pemerintah. Temuan studi ini menunjukkan bahwa pembangunan yang adil meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja selain meningkatkan standar hidup bagi populasi di daerah yang kurang berkembang. Selain itu, pemerataan pembangunan berkontribusi pada stabilitas sosial dan politik, mengurangi konflik akibat ketimpangan, dan memperkuat persatuan nasional. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi kebijakan pemerataan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan, melibatkan peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif di seluruh Indonesia.

Kata kunci: Kesejahteraan Masyarakat, Pertumbuhan Ekonomi, Program Pemerintah

1. LATAR BELAKANG

Pemerataan pembangunan ekonomi adalah salah satu isu strategis yang menjadi perhatian utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Pembangunan yang tidak merata dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan, hingga ketidakadilan dalam akses terhadap layanan publik. Sebagai negara dengan wilayah yang luas dan karakteristik geografis serta demografis yang beragam, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa setiap daerah mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan ekonomi yang berlangsung.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia masih menjadi tantangan serius, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan,

serta antara wilayah barat dan timur Indonesia. Wilayah barat, terutama Pulau Jawa, masih menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional, sementara wilayah timur seperti Papua dan Maluku cenderung tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta kesempatan ekonomi. Ketimpangan ini berimplikasi pada rendahnya kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah yang tertinggal, yang pada gilirannya menghambat upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh negeri.

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi ketimpangan pembangunan dengan berbagai kebijakan dan program, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur besar-besaran yang meliputi pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, dan proyek strategis nasional lainnya. Selain itu, program Dana Desa yang diluncurkan sejak 2015 juga bertujuan untuk mendukung pembangunan di tingkat desa, dengan harapan agar daerah-daerah terpencil dan tertinggal dapat lebih cepat berkembang. Meski demikian, hasil dari program-program ini masih menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan diantara beberapa daerah yang lebih maju dan daerah-daerah yang tertinggal.

Pemerataan pembangunan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dengan penyebaran investasi, kesempatan kerja, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Pembangunan yang merata memungkinkan semua lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil, untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi dan menikmati hasilnya. Ketika pembangunan hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, maka akan terjadi ketimpangan yang berujung pada ketidakstabilan sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Selain itu, pemerataan pembangunan ekonomi sangat penting dalam menciptakan kesetaraan dan inklusi sosial. Masyarakat di daerah tertinggal, jika tidak mendapatkan akses yang sama terhadap pembangunan, cenderung tertinggal dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Sebaliknya, ketika pembangunan dilakukan secara merata, masyarakat di wilayah tertinggal dapat meningkatkan kualitas hidupnya, memperbaiki pendapatan, dan berkontribusi secara lebih optimal dalam perekonomian nasional.

Menurut teori pembangunan ekonomi, distribusi sumber daya yang adil dan merata sangat penting untuk mencapai kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan. Sen (1999), salah satu ekonom terkemuka dalam bidang kesejahteraan, menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari kapabilitas dan kesempatan yang dimiliki oleh individu. Dengan demikian, pemerataan pembangunan ekonomi bukan

hanya sekadar masalah pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan pemerataan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia adalah karakteristik geografis yang unik, di mana banyak daerah terpencil sulit dijangkau, serta adanya perbedaan dalam kapasitas dan sumber daya antarwilayah. Daerah-daerah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku masih mengalami kendala infrastruktur dan investasi, sehingga tidak dapat mengoptimalkan potensi mereka untuk pertumbuhan ekonomi. Selain itu, masalah manajemen dan korupsi di tingkat lokal juga sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pemerataan pembangunan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya pemerataan pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini akan melihat bagaimana program-program pemerintah dan investasi dalam infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta bagaimana pembangunan yang merata dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah-daerah tertinggal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi kebijakan pemerataan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

Dengan kajian ini, kita dapat memahami lebih dalam tentang peran penting pemerataan pembangunan ekonomi dalam mengatasi ketimpangan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pemerataan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan peran aktif pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

2. KAJIAN PUSTAKA

a. Teori Pembangunan Ekonomi

Menurut Todaro and Smith (2009), pembangunan ekonomi merujuk pada proses yang mengarah pada peningkatan pendapatan per kapita, perbaikan kualitas hidup, dan pengurangan tingkat kemiskinan dalam suatu masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembangunan ekonomi menjadi fokus utama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Namun, pembangunan yang tidak merata dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi yang lebih lebar di berbagai daerah.

b. Teori Pemerataan Ekonomi

Teori pemerataan ekonomi menjelaskan pentingnya distribusi sumber daya yang adil dan merata di seluruh wilayah untuk mencapai kesejahteraan yang lebih inklusif. Sen

(1999) dalam karyanya menekankan bahwa kesejahteraan bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga terkait dengan kapabilitas dan kesempatan yang dimiliki individu. Pemerataan pembangunan sangat berpengaruh terhadap penciptaan peluang-peluang tersebut, terutama di wilayah-wilayah yang kurang berkembang.

c. Teori Kesejahteraan Masyarakat

Teori kesejahteraan masyarakat berfokus pada bagaimana pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu. Salah satu teori yang sangat berpengaruh adalah Capability Approach yang dikembangkan oleh Amartya Sen (1999). Teori ini menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari pendapatan atau kekayaan materi, tetapi juga dari kapabilitas individu untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan produktif.

Menurut Sen, kapabilitas adalah kemampuan individu untuk mencapai tujuan hidup yang mereka nilai penting, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lingkungan yang aman. Pembangunan ekonomi harus bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas ini, sehingga setiap individu dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Pemerataan pembangunan berperan penting dalam teori ini, karena tanpa akses yang merata terhadap layanan dasar dan infrastruktur, kapabilitas masyarakat di daerah tertinggal akan terhambat, dan kesejahteraan tidak akan tercapai secara menyeluruh.

Dalam konteks Indonesia, daerah-daerah yang tertinggal seringkali menghadapi masalah keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Hal ini menyebabkan kapabilitas masyarakat di daerah tersebut rendah, yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan. Program-program pemerataan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil dan program kesehatan serta pendidikan gratis bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat, terutama di daerah yang tertinggal.

Kesejahteraan masyarakat juga terkait erat dengan pemerataan kesempatan ekonomi. Ketika akses terhadap pasar, sumber daya, dan layanan publik tidak merata, maka masyarakat di wilayah tertinggal akan kesulitan untuk berkembang. Oleh karena itu, teori kesejahteraan masyarakat menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang tempat tinggal atau status sosial, memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk memahami pentingnya pemerataan pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai sumber literatur akademik dan data sekunder dari penelitian terdahulu, yang memungkinkan peneliti menggali teori, konsep, dan temuan yang relevan tanpa perlu melakukan pengumpulan data primer. Sumber data diambil dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang diakses melalui platform terpercaya seperti Google Scholar untuk menemukan artikel akademik dan Publish or Perish untuk menganalisis data sitasi. Penelitian ini juga memanfaatkan publikasi dari situs web pemerintah, organisasi internasional, dan lembaga riset yang menyediakan informasi terkini tentang kebijakan pemerataan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mensintesis berbagai pandangan dan menarik kesimpulan yang mendukung tujuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

A. Kesenjangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Kesenjangan pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan isu yang signifikan dan kompleks. Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan antara wilayah, kelompok masyarakat, dan sektor ekonomi tetap menjadi tantangan utama. Berdasarkan data, terdapat perbedaan mencolok dalam hal pendapatan, akses terhadap layanan dasar, dan peluang ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Salah satu penyebab utama kesenjangan ini adalah disparitas dalam infrastruktur dan investasi. Wilayah Jawa, terutama DKI Jakarta, sering mendapatkan alokasi investasi yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah timur seperti Papua dan NTT. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di wilayah yang sudah berkembang, sementara daerah yang tertinggal tetap terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan ekonomi.

Selain itu, faktor pendidikan dan kesehatan juga berkontribusi terhadap kesenjangan pembangunan. Akses yang tidak merata terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan di berbagai daerah menyebabkan rendahnya kemampuan sumber daya manusia, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan

ekonomi di daerah-daerah tersebut. Kesenjangan ini menciptakan tantangan sosial dan ekonomi yang serius, termasuk meningkatnya kemiskinan dan ketidakpuasan sosial.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kesenjangan ini, seperti program Dana Desa dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Namun, efektivitas program-program tersebut masih perlu ditingkatkan agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi kebijakan pembangunan guna memastikan pemerataan ekonomi yang lebih baik dan peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia.

B. Dampak Pemerataan Terhadap Kesejahteraan

Pemerataan pembangunan ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Ketika pembangunan ekonomi dilakukan secara merata, hal ini dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang selama ini mengganggu stabilitas dan pertumbuhan nasional. Salah satu dampak positif dari pemerataan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang esensial untuk meningkatkan kualitas hidup.

Dengan adanya pemerataan, masyarakat di daerah tertinggal mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka. Misalnya, pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan tidak hanya mempermudah akses ke pasar dan layanan, tetapi juga meningkatkan peluang usaha bagi masyarakat. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM), yang menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, akan terjadi perbaikan dalam taraf hidup, yang berdampak pada peningkatan konsumsi dan daya beli.

Selain itu, pemerataan juga berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Ketika lebih banyak masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai, maka kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat. Masyarakat yang lebih sehat dan terdidik memiliki kapasitas yang lebih baik untuk berkontribusi pada ekonomi, menciptakan siklus positif yang berkelanjutan.

Namun, dampak positif pemerataan tidak akan tercapai tanpa adanya komitmen dan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, strategi pemerataan pembangunan harus dirancang dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Dengan cara ini, dampak positif dari pemerataan pembangunan dapat lebih dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, membawa Indonesia menuju kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

C. Program Pemerintah Yang Mendukung Pemerataan

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa program utama yang berfokus pada pemerataan antara lain:

1) Dana Desa

Program ini bertujuan untuk memberikan alokasi anggaran yang lebih besar kepada desa-desa untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Dengan adanya Dana Desa, pemerintah berharap dapat memperbaiki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, sehingga memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

2) Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program bantuan sosial yang memberikan dukungan keuangan kepada keluarga miskin dengan persyaratan tertentu, seperti anak-anak harus bersekolah dan ibu hamil harus menjalani pemeriksaan. Tujuan dari program ini adalah untuk mempromosikan pendidikan yang baik bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

3) Program Sembako

Program Sembako memberikan bantuan bahan pokok kepada masyarakat miskin dan rentan. Melalui program ini, pemerintah berupaya mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan memastikan akses terhadap kebutuhan pokok, sehingga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4) Program Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah juga mengimplementasikan berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang berfokus pada daerah tertinggal dan terpencil. Proyek seperti pembangunan jalan, jembatan, dan akses air bersih bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, sehingga memperkuat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

5) Program Pelatihan dan Keterampilan

Untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing tenaga kerja, pemerintah menawarkan program pelatihan keterampilan kepada masyarakat umum, terutama di daerah pedesaan. Dengan membantu masyarakat meluncurkan usaha mereka sendiri atau menemukan pekerjaan yang lebih baik, program-program ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan.

6) Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR merupakan program yang memberikan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan bunga yang rendah. Dengan adanya KUR, pelaku usaha di daerah tertinggal dapat lebih mudah mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha mereka, yang berdampak pada peningkatan ekonomi lokal.

Melalui berbagai program tersebut, pemerintah Indonesia berupaya untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, terutama di daerah yang selama ini tertinggal. Kesuksesan program-program ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang efektif dan partisipasi aktif dari masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Pentingnya Pemerataan Pembangunan

Di Indonesia, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antar wilayah—terutama antara wilayah maju dan tidak maju—memerlukan pembangunan yang adil. Mirip dengan masalah pendidikan di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan akses pendidikan di Indonesia. Dengan mendirikan sekolah atau program pendidikan di lokasi terpencil, memberikan bantuan keuangan kepada organisasi komunitas berpenghasilan rendah, dan memberlakukan undang-undang yang mendorong kelompok komunitas yang kurang terwakili dalam pendidikan, pemerintah dapat memperluas akses ke

pendidikan. Dengan menawarkan bantuan dan informasi tentang program pendidikan saat ini, serta dengan membantu kelompok yang kurang terwakili dalam masyarakat untuk mendapatkan akses ke program-program ini, komunitas dapat berpartisipasi dalam inisiatif untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan sementara.

Secara keseluruhan, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia sangat bergantung pada pertumbuhan pendidikan yang adil dan berkualitas tinggi. Seluruh pemangku kepentingan dalam proses pendidikan harus dilibatkan dalam upaya terkoordinasi dan berjangka panjang untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Memperjuangkan hak setiap anak atas pendidikan berkualitas tinggi dan jangka panjang sangat penting untuk mencapai pemerataan pembangunan melalui pendidikan. Hal ini dapat dicapai dengan inisiatif termasuk meluncurkan kampanye dan program penjangkauan untuk meningkatkan kesadaran akan nilai pendidikan, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan. Pengambilan keputusan, dan menyiapkan infrastruktur dan fasilitas yang sesuai untuk memfasilitasi keterlibatan masyarakat. (Maula et al., 2023)

Kualitas hidup masyarakat secara nasional akan meningkat sebagai hasil dari pemerataan pembangunan, yang akan memberikan akses yang lebih besar kepada semua wilayah terhadap peluang ekonomi, infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, pemerataan pembangunan membantu menciptakan stabilitas sosial dan politik dengan mengurangi potensi konflik akibat ketidakadilan ekonomi. Hal ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana setiap daerah dapat berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian nasional. Pemerataan pembangunan juga memungkinkan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien di daerah-daerah yang sebelumnya kurang berkembang, yang pada akhirnya memperkuat perekonomian nasional dan memperbaiki kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

B. Dampak Positif Pemerataan Pembangunan Di Indonesia

Pemerataan pembangunan di Indonesia membawa dampak positif yang signifikan bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu dampak utamanya adalah pengurangan kesenjangan ekonomi antar daerah, yang memberikan akses yang lebih merata terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah tertinggal.

Selain itu, dengan adanya pembangunan yang merata, daerah-daerah yang sebelumnya kurang berkembang dapat meningkatkan potensi ekonominya, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dampak positif lainnya adalah peningkatan stabilitas sosial dan politik, karena dengan adanya kesejahteraan yang lebih adil, konflik dan ketidakpuasan akibat ketimpangan dapat diminimalkan. Secara keseluruhan, pemerataan pembangunan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang memperkuat persatuan dan kesatuan nasional.

Pemerataan pembangunan ekonomi sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia karena beberapa alasan seperti:

1. Mengurangi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi: Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan atau antara wilayah barat dan timur Indonesia sering menyebabkan perbedaan besar dalam taraf hidup masyarakat. Dengan pemerataan pembangunan, akses ke fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan lebih adil, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.
2. Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi: Pembangunan yang merata dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor pertanian, industri, dan jasa. Ketika semua wilayah mendapat akses yang sama terhadap teknologi, modal, dan pasar, potensi ekonomi di berbagai daerah dapat dimaksimalkan, yang pada akhirnya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
3. Mengurangi Pengangguran dan Kemiskinan: Pemerataan pembangunan membuka lapangan kerja di berbagai daerah, terutama di wilayah-wilayah yang sebelumnya tertinggal. Ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi di daerahnya masing-masing.
4. Meningkatkan Kualitas Hidup: Dengan adanya pemerataan pembangunan, masyarakat di berbagai daerah bisa mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Hal ini secara langsung meningkatkan kualitas hidup, harapan hidup, dan tingkat kebahagiaan masyarakat.
5. Stabilitas Sosial dan Politik: Ketimpangan pembangunan ekonomi sering kali memicu ketidakpuasan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik. Dengan

pemerataan pembangunan, ketidakpuasan tersebut dapat ditekan, sehingga menjaga stabilitas sosial dan politik yang penting bagi pembangunan jangka panjang.

C. Tantangan Dalam Pemerataan Indonesia

Salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, adalah pembangunan yang adil. Dengan lebih dari 17.000 pulau di seluruh wilayah geografis yang luas, Indonesia berjuang untuk mendistribusikan sumber daya dan pembangunan secara adil di seluruh wilayah. Perbedaan dalam pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia, serta antara pulau Jawa dan pulau-pulau di luar Jawa, masih menjadi isu yang signifikan (Wahyuni & Wahyuningsih, 2023). Infrastruktur menjadi salah satu aspek kunci dalam upaya pemerataan pembangunan. Keterbatasan akses transportasi, komunikasi, dan energi di daerah-daerah terpencil menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial di wilayah-wilayah tersebut. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pembangunan infrastruktur, seperti program Tol Laut dan pembangunan jalan trans-Papua, masih banyak daerah yang belum terjangkau secara memadai (Pratama et al., 2022).

Perbedaan infrastruktur yang signifikan antara wilayah timur dan barat Indonesia, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan, adalah salah satu hambatan utama untuk pembangunan yang adil di negara tersebut. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan infrastruktur, disparitas dalam akses terhadap transportasi, telekomunikasi, dan energi masih menjadi hambatan besar bagi pertumbuhan ekonomi yang merata. Menurut penelitian Pratama et al. (2022), pembangunan infrastruktur memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia, namun distribusi investasi infrastruktur yang tidak merata menyebabkan perbedaan tingkat pertumbuhan antar wilayah.

Tantangan kedua adalah ketimpangan dalam kualitas sumber daya manusia antar daerah di Indonesia. Perbedaan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan antara wilayah maju dan tertinggal mengakibatkan kesenjangan dalam produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah. Nurkholis et al. (2022) menemukan bahwa disparitas modal manusia memiliki dampak besar pada variasi pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Hasil kesehatan dan pendidikan yang

lebih baik biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. sementara daerah tertinggal sulit untuk mengejar ketertinggalan tanpa adanya intervensi kebijakan yang tepat.

Tantangan ketiga berkaitan dengan dampak perubahan iklim dan kerentanan terhadap bencana alam yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang terletak di cincin api Pasifik, Indonesia menghadapi risiko bencana alam yang tinggi, namun dampaknya tidak merata antar daerah. Lassa dan Nugraha (2023) menganalisis bahwa perubahan iklim dan bencana alam memiliki potensi untuk memperparah ketimpangan pembangunan yang ada. Daerah-daerah yang lebih rentan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya, lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam, sehingga upaya untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan menjadi lebih sulit.

5. KESIMPULAN

Pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan langkah krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial serta ekonomi. Melalui berbagai program pemerintah seperti Dana Desa dan Program Keluarga Harapan (PKH), upaya untuk memperbaiki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur telah menunjukkan dampak positif yang signifikan. Pembangunan yang merata meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di daerah yang sebelumnya tertinggal.

Namun, untuk mencapai hal ini, semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, harus berkomitmen dan bekerja sama untuk mencapainya. Sangat penting bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, pemerataan pembangunan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Tantangan yang dihadapi, seperti dampak perubahan iklim dan kerentanan terhadap bencana alam, juga perlu diatasi dengan kebijakan yang tepat agar semua daerah dapat mengejar ketertinggalan dan mencapai kesejahteraan yang lebih adil.

DAFTAR REFERENSI

- Arsyad, L. (2017). Ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi. Tersedia secara online di: <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA4324-M1.pdf> [diakses di Lembang, Jawa Barat, Indonesia: 2 Oktober 2018].
- Astuti, R. S. (2017). Implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar dalam upaya pemerataan pendidikan tahun ajaran 2015/2016 di SMP N 1 Semin. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 6(2), 121-127.
- Azis, A. (2020). Perencanaan dan pengalokasian dana desa berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar pemerataan pembangunan nasional (Studi kasus: Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat). *Pamulang Law Review*, 2(2), 73-86.
- Imaduddin, A. K., Maslichah, M., & Sudaryanti, D. (2022). Analisis akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya pemerataan pemberdayaan masyarakat (Studi di Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro). *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(05).
- Juliana, J., Marlina, R., Saadillah, R., & Mariam, S. (2018). Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perspektif politik ekonomi Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 259-268.
- Khaerunissa, S., Hasanah, B., & Sururi, A. (2023). Kapasitas inovasi program dana pembangunan wilayah kelurahan dalam mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2).
- Kusumawati, E. (2019). Analisis implementasi program keluarga harapan (PKH) untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dalam perspektif ekonomi Islam (Studi kasus Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati). Skripsi, Ekonomi Islam, Semarang.
- Lestari, D. S. T., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Program industrialisasi dalam mengatasi kesenjangan ekonomi di masyarakat: Perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 288-297.
- Maula, I., Irwandi, I., Sari, A. L., Sarimin, D. S., & Rondonuwu, R. H. (2023). Pendidikan untuk pemerataan pembangunan: Memperjuangkan hak semua anak. *Journal on Education*, 5(4), 13153-13165.
- Pracelia, V. R., Widodo, D., & Radjikan, R. (2024). Implementasi program keluarga harapan melalui kartu Indonesia pintar dalam upaya pemerataan pendidikan di Kota Surabaya–Jawa Timur. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(3), 21-30.
- Putrie, R. A., Arifuddin, A., Ni'amah, M., Putri, S. K., & Iffah, N. (2023). Pengembangan program pelatihan keterampilan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam meningkatkan perekonomian lokal. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 7554-7560.
- Rahman, H. (2017). Potret pertumbuhan ekonomi, kesenjangan dan kemiskinan di Indonesia dalam tinjauan ekonomi politik pembangunan. *Ilmu dan Budaya*, 40(55).

- RIDWAN, R., & Saprudin, S. (2024). Pembangunan ekonomi regional.
- Saskara, I. N., & Putra, I. G. A. A. S. (2013). Efektivitas dan dampak program bantuan kredit usaha rakyat (KUR) terhadap pendapatan dan kesempatan kerja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(10), 44638.
- Sen, A. (2014). Development as freedom (1999). In *The globalization and development reader: Perspectives on development and global change* (p. 525).
- Sukwika, T. (2018). Peran pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 6(2), 115-130.
- Tangkumahat, F. V., Panelewen, V. V., & Mirah, A. D. (2017). Dampak program dana desa terhadap peningkatan pembangunan dan ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahas. *Agri-Sosioekonomi*, 13(2A), 335-342.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development*. Pearson UK.